

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada umumnya konflik di dalam tubuh partai politik disebabkan oleh hal yang relatif tidak jauh berbeda antara satu partai dengan yang lainnya. Konflik dalam organisasi politik atau internal partai politik bukan merupakan hal yang baru, karena keberadaan konflik merupakan bagian dari proses sosial di dalam organisasi partai politik misalnya, konflik internal PDI Perjuangan pada Kongres II Bali 2005 dengan melibatkan Kubu Megawati dan kelompok Gerakan Pembaruan yang kemudian menghasilkan partai baru bernama Partai Pembaruan Demokrasi (PDP). Partai Amanat Nasional (PAN) juga pernah mengalami kondisi serupa. Di tahun 2005 Munas II di Semarang telah membelah PAN menjadi dua kelompok, yaitu kubu Fuad Bawazier dan Kubu Soetrisno Bachir (Lili Romli, et al., 2008:28). Oleh karena itu, konflik yang terjadi di dalam partai politik diperlukan manajemen konflik. Namun, seringkali fungsi manajemen konflik dalam partai politik tidak bisa dijalankan dengan baik dan benar, sehingga hampir dipastikan semua partai politik, baik besar maupun kecil, tidak pernah sepi dari konflik internal yang terjadi baik itu skala daerah, wilayah dan pusat.

Partai Golongan Karya atau yang sering disingkat dan dikenal dengan sebutan “Partai Golkar” adalah merupakan partai yang terlahir di era orde baru. Kepolitikan otoriter era Orde Baru digantikan oleh sistem politik yang

demokratis pada era reformasi. Soeharto dalam menyerahkan jabatan presiden kepada B.J Habibie yang juga dari Golkar, namun Soeharto gagal mewariskan struktur politik Orde Baru secara utuh kepada wakilnya itu. Struktur politik Orde Baru dan sistem kepartaian yang menempatkan Golkar pada posisi dominan tersebut kemudian runtuh bersama jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto (Akbar Tanjung, 2007:9).

Selanjutnya, partai Golkar yang diketuai oleh Aburizal Bakri, pada Pilpres 2014, melakukan koalisi ke partai politik pengusung Calon Presiden Prabowo-Hatta. Meskipun dalam pemilu 2014 Golkar mampu berada pada posisi kedua dalam perolehan kursi di parlemen. Golkar tidak memilih/memutuskan calon presiden. Kondisi demikian merupakan awal mencuatnya konflik di dalam tubuh internal partai Golkar, dimana terjadinya perbedaan pandangan kader di daerah terhadap arah koalisi yang dibangun. Perbedaan tersebut mengarahkan pada pemecatan sejumlah kader yang membelot dari instruksi partai. Pemecatan sejumlah kader tersebut, merupakan akibat dari mangkirnya kader yang tidak mengindahkan instruksi partai dalam mendukung koalisi dengan partai Gerindra.

Kejadian semacam itulah membuat manajemen konflik diperlukan oleh partai politik dalam mereduksi konflik yang ada. Pengelolaan konflik dilakukan bagi aktor yang terlibat sebagai pengambil keputusan politik, seperti bagi-bagi kekuasaan dalam rangka mendapatkan posisi tertinggi dalam struktur kepengurusan partai politik. Ketidakmampuan elit dan fungsionaris

partai dalam mereduksi pengelolaan konflik di internal partai mengindikasikan bahwa belum terorganisirnya lembaga partai politik secara baik.

Konflik yang terjadi di DPP Golkar, berpengaruh terhadap perselisihan yang ada di DPD I Golkar Sulawesi Barat. Terjadinya pemecatan kader yang membelot dari instruksi partai merupakan awal munculnya konflik di internal DPD I Golkar Sulbar. Sehingga fokus utama penulis dalam penelitian ini adalah konflik didalam internal Golkar Sulbar dengan sedikit menggambarkan keterkaitan isu nasional untuk mempermudah telaah pembahasan penelitian. Sementara itu, penulis akan menggambarkan yang menelatarbelakangi konflik yang terjadi didalam internal Golkar Sulbar terlepas dari peranan DPP melakukan pemecatan. Terjadinya dualisme kepemimpinan DPD diantara Kubu Anwar dan kehadiran Nurdin Halid selaku Plt ketua DPD I Golkar Sulbar. Hal tersebut kemudian menciptakan dinamika didalam internal Golkar akibat mendapat penolakan dari kader atas kehadiran Nurdin Halid sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di Sulbar. Konflik pun kian tak terelakan ketika kehadiran Nurdin juga mendapat penolakan dari sebagian kalangan pengurus DPD yang menganggap kehadiran Nurdin sebagai Plt ketua cacat mekanisme partai. Sedangkan secara terpisah Nurdin dengan keras mengingatkan kepada kader dan pengurus Golkar di Sulbar melalui mandat dari DPP bahwa keberadaanya sah secara hukum atas dirinya yang diamanatkan untuk memimpin sementara Golkar di Sulbar dengan menggantikan Anwar yang telah dipecat akibat melanggar instruksi partai. Oleh karena itu, konflik yang terjadi merupakan tantangan bagi Partai Golkar Sulbar untuk segera

menyelesaikan, sebab hal tersebut akan menjadi ancaman terhadap kesiapan kader pilihan Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada di sejumlah Kabupaten di Provinsi Sulbar.

Anwar Adnan Saleh yang juga Gubernur Sulawesi Barat telah sukses menghantarkan partai Golkar sebagai basis kekuatan di Sulbar, terbukti dengan memenangkan kandidat yang disusunnya dalam pilkada di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polman dan Kabupaten Majene. Selain itu, solidnya kader Golkar telah menghantarkannya sebagai partai penguasa di Sulbar yaitu ditandai dengan kesuksesannya memenangkan pilkada Gubernur Sulawesi Barat 2011 dan Pemilu 2009 lalu.

Tabel 1. Jumlah Kursi Partai Politik-DPRD Provinsi Sulawesi Barat periode 2009-2014 (45 orang)

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Golkar	13
2	Demokrat	5
3	PAN	5
4	PDIP	3
5	Gerindra	3
6	PDK	3
7	PKS	2
8	Hanura	2
9	PKB	1
10	PBR	1
11	PPP	1
12	PDS	1
13	PPD	1
14	Partai Buruh	1
15	PBN	1
16	PKPB	1
17	PNIM	1

Sumber: <http://kpu-sulbarprov.go.id>

Namun posisi partai Golkar saat ini, mendapat tantangan akibat adanya konflik internal yang terjadi diantara kepengurusan Anwar dengan Nurdin Halid dan juga adanya kekalahan dalam pemilu kemarin yang harus puas pada posisi kedua di DPRD Provinsi Sulbar, sehingga kursi ketua DPRD tidak lagi diraih oleh kader partai Golkar seperti 2009 kemarin, namun kursi ketua diraih oleh partai Demokrat sebagai pemenang pemilu 2014.

Tabel 2. Jumlah Kursi Partai Politik-DPRD Provinsi Sulawesi Barat periode 2014-2019 (45 orang)

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Demokrat	10
2	Golkar	9
3	Gerindra	6
4	PAN	5
5	PDIP	4
6	Hanura	3
7	PPP	2
8	Nasdem	2
9	PKS	2
10	PKB	1
11	PKPI	1

Sumber: <http://kpu-sulbarprov.go.id>

Kondisi demikian, sangatlah sulit untuk mengulang kesuksesan untuk memenangkan pilkada di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat seperti pilkada sebelumnya. Oleh karena itu, partai Golkar dituntut untuk mengakhiri konflik, dan mempersiapkan rekrutmen kader potensial dalam menyelamatkan kekuatan partai Golkar di Sul-bar sebelum pilkada serentak digelar.

Berdasarkan uraian di atas, maka sejumlah problem penting dalam penelitian ini terkait dengan, (1) konflik yang terjadi di dalam internal Partai

Golkar di Sulawesi Barat, (2) keterpilihan kader partai Golkar dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2015.

Dalam hal ini penulis mencoba merumuskan judul penelitian proposal Tesis yaitu “Konflik Internal dan Rekrutmen Politik Partai Golkar Sulawesi Barat (*Studi Konflik Internal dan Keterpilihan Kader Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada dan Pemilu di Provinsi Sulawesi Barat 2014*).

I.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dirumuskan pokok penelitian ini adalah:

Apakah konflik Partai Golkar di Sulbar mempengaruhi keterpilihan kader menjelang Pilkada di beberapa Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat 2015?

I.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana konflik terjadi di dalam internal DPD I Partai Golkar dalam menyikapi Pilpres 2014.?
2. Menganalisis dan menjelaskan model pengelolaan konflik di dalam internal DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana proses terjadinya konflik internal DPD I Partai Golkar dan implikasinya terhadap keterpilihan kader dalam menghadapi Pilkada dan Pemilu di Sulawesi Barat.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan referensi dalam mengkaji konflik internal DPD I Partai Golkar, model pengelolaan konflik, proses rekrutmen politik oleh partai dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada di Sulawesi Barat sehingga menambah dan memperkayah pengetahuan kami dalam belajar khususnya bagi jurusan ilmu pemerintahan.
2. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, bisa bermanfaat bagi penelitian selanjutnya atau pihak-pihak yang kemudian tertarik dalam mengkaji dan memahami Dinamika politik partai Golkar, model pengelolaan konflik, dan proses rekrutmen kader dalam menghadapi Pemilu dan pilkada di Sulawesi Barat.